

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Citra AdityaBakti. Bandung.

Aris P Santoso, Indra H, Erna Chotidjah, 2022, *Pengantar Hukum Investasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustakabarupress

Basuki Pujoalwant. 2014 *Perekonomian Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Charles N. Henning, 1958. *Internasional Finance*. Harper and Brothers Publisher. New York.

Dendy Apriandi. 2021. *Strategi dan Reformasi Perizinan Berusaha untuk Penguatan Investasi Melalui UU CK*. Kementerian Investasi./BKPM.

Dirjen Perimbangan Keuangan RI. *Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung*. Jakarta. 2021.

Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Alfabeta, Bandung

Jelly Leviza. 2009. *Tanggung Jawab Bank Dunia dan IMF sebagai Subjek Hukum Internasional*. Sofmedia. Jakarta.

KPPOD. *Reformasi Kemudahan Berusaha Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah*. KPPOD. Jakarta. 2016.

Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajat. Yogyakarta.

Peter B. Kenen dan Raymond Lubitz. 1982. *Ekonomi Internasional*: Edisi ke-3. Pustaka Universitas. Jakarta.

Saifuddin Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.



2020, *Hukum Ekonomi Sebuah Intisari Singkat*. Koto Baru Solok: ai Insan Cendekia Mandiri

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Ubaidillah K, Nurul f, Duhita D Suprpti, 2018. *Hukum Ekonomi*. Semarang: BPFH UNNES

### **Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya**

Anis Nur Nadhiroh. 2021. *Analisis Kebijakan Online Single Submission Terhadap Investasi Dalam Aspek Lingkungan Hidup*. Tesis. Universitas Islam Indonesia.

Asmara, Teguh Tresna Puja, dkk. 2019. *Ease Of Doing Business: Gagasan Pembaruan Hukum Penyelesaian Sengketa Investasi di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal. Vol. 4 No. 2. Oktober 2019.

Bill Orr. 1990. *Are the IMF and the World Bank on the Right Track?*. ABA Banking Journal. Vol. 82.

Dandy Ramadhan dan Wisnu Tri Nugroho. *Analisis Terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Ease Of Doing Business (EODB) Ditinjau Melalui Perspektif Kaidah Fiqh Adz-Dzariah Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Maqashid Syariah*. International Summit On Science Technology And Humanity (ISETH2019) Advancing Scientific Thought For Future Sustainable Development.

Edward James. *Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia*. Jurnal Rechtsvinding. Volume 6. Nomor 3.

Fiat Justisia. 2014. ISSN 1978-5186: *Jurnal Ilmu Hukum* 8. no. 1.

G. J. H. Van Hoof. 1984. *Supervision within the World Bank: Supervision Mechanism in International Organization*. Asser Intitute.

Kementrian Investasi/BKPM, 2021, Laporan Kinerja Kementrian Investasi/BKPM

-----, 2021, *Penghentian EODB dan Kelanjutan Kemudahan Berusaha di Indonesia*. BPKM.

Nadhilah, dkk, 2020. *Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Diikat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dihadungkan dengan Ease of Doing Business (EODB) dalam Perspektif Kepastian Hukum*. Jurnal Poros Hukum Indonesia. Volume 1. Nomor 2.



Novita Nurul Ain, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, Jurnal Al-Tsaman

Nufransa Wira Sakti. *Mengerek Kemudahan Berbisnis*". Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan FIsikal.

Tomi Setianto. 2020. "*Ease Of Doing Business in Indonesia: A Long Road*", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 10 No 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007

### **Sumber Internet**

Aletheia Rabbani. *Pengertian Ease Of Doing Business, Indikator, Faktor Penghambat, dan EODB di Indonesia*. 26 Mei 2022  
<https://www.sosial79.com/2021/08/Pengertian%20Ease%20of%20Doing%20Business.html>

Badan Koordinasi Penanaman Modal. *Ease of Doing Business di Indonesia Terus membaik*. 31 Mei 2022  
<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/ease-of-doing-business-di-indonesia-terus-membaik>

Canda Fajri Ananda (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Doing Business di Indonesia*. 30 Mei 2022  
<https://feb.ub.ac.id/id/doing-business-di-indonesia.html>

Imron Rosyadi. *Opini: Pertaruhan Nama Baik Bank Dunia*. 29 April 2022  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211007/9/1451567/opini-pertaruhan-nama-baik-bank-dunia>

Anonim. *Kelompok Bank Dunia*. 3 Maret 2022  
<http://www.klndepkeu.tripod.com/orgns/woba.htm>

Mochahmad Januar Rizki. *Kantor Hukum WilmareHale dan Temuan Penyimpanan Survei EODB*. 21 September 2021  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/kantor-hukum-wilmarehale-dan-temuan-penyimpangan-survei-eodb-lt61484c5522d0a>

Mochahmad Januar Rizki. *Terindikasi Fraud, Bank Dunia Stop Lanjutkan Survei EODB*. 29 April 2022  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terindikasi-fraud--bank-dunia-stop-lanjutkan-survei-eodb-lt614452c6236c1/?page=all>



- Nirmala Aninda. 2019. *Peringkat EODB Indonesia Tetap Pada Peringkat 73.* 31 Mei 2022  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20191024/9/1162908/peringkat-eodb-2020-indonesia-tetap-pada-peringkat-73>
- Pritta Andrani Widyanarko. 2021. *Meninjau Kemudahan Berusaha setelah Laporan EODB dihentikan.* 18 Mei 2022  
<https://mediaindonesia.com/opini/437813/meninjau-kemudahan-berusaha-setelah-laporan-eodb-dihentikan>
- World Bank. Who We Are.* 13 Februari 2022  
<https://www.worldbank.org/en/who-we-are>
- \_\_\_\_\_. *About.* 13 Februari 2022  
<https://www.worldbank.org/en/about>
- Yusuf Imam Santoso. *EODB disetop sementara Pemerintah akan memanfaatkan UU Cipta Kerja.* 31 Mei 2022  
<https://nasional.kontan.co.id/news/eodb-disetop-sementara-pemerintah-indonesia-akan-manfaatkan-uu-cipta-kerja>



## LAMPIRAN

Lampiran 1: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANGGANTI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
- b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;
- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa . . .



## Lampiran 2: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
  - b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
  - c. bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
  - d. bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
  - e. bahwa ...

